



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (dua puluh empat)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 8 Juni 2022
Pukul	:	13.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	M. Sarmuji, S.E, M.Si/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pembahasan RKP dan RKA TA 2023; 2. Progres dan Rencana Penyaluran BPUM; 3. Pembahasan mengenai Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah; 4. Sertifikasi UMKM bermasalah.
Hadir	:	1. 43 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki; 3. Kepala BSN, Kukuh S Achmad beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Kepala BSN pada pukul 14.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 8 Juni 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E, M.Si.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.287.517.242.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.233.885.556.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan untuk selanjutnya akan mendalami Usulan Lanjutan Program BPUM dengan target 12,8 juta penerima berdasarkan 212 Wilayah Kemiskinan Ekstrem, masing-masing penerima mendapatkan Rp600.000 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI mendesak Satgas Koperasi Bermasalah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk lebih intens dan serius, dalam menangani permasalahan koperasi-koperasi yang bermasalah di lapangan, jika diperlukan dilakukan penindakan tegas.
5. Komisi VI DPR RI menyetujui agar Usulan Alokasi Pendataan KUMKM sebesar Rp374.662.893.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sebagian direalokasikan untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.
6. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional RI Tahun 2023 sebesar Rp198.285.122.000 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Badan Standardisasi Nasional RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.49 WIB.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI

Ttd.

TETEN MASDUKI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

M. SARMUJI, S.E, M.Si
A-318

**KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL (BSN)**

Ttd.

KUKUH S ACHMAD